

**EKSISTENSI KOPERASI SANTRI DI DALAM PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN PESANTREN
(Study Kasus di Pondok Pesantren An Nuur II Bululawang Malang)**

SKRIPSI

Oleh:
SANIN
(01160022)



**JURUSAN ILMU PENDIDIKAN SOSIAL
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
2008**

**EKSISTENSI KOPERASI SANTRI DI DALAM PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN PESANTREN
(Study Kasus di Pondok Pesantren An Nuur II Bululawang Malang)**

S K R I P S I

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Sarjana Pendidikan (S.Pd)

O l e h

**SANIN
NIM: 01160022**



**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

NOTA PEMBIMBING:

Hal : perbaikan Skripsi

a.n.

Sanin

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Malang

Di

Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami baca, teliti kembali, dan di adakan perbaikan,
penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa
skripsi saudara:

Nama : Sanin

Nim : 01160022

Jurusan : Ilmu Pendidikan Sosial

Judul : **Eksistensi Koprasi Santri Dalam Pembangunan**

Dan **Pengembangan Pondok Pesantren An-Nur II**
Malang

Ternyata telah di perbaiki dan di sempurnakan sesuai dengan keputusan
sidang yang dilaksanakan pada tanggal : 17-04-2008.

Demikian atas perhatian bapa, kami sampaikan banyak terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing

Ni'matuz Zuhroh.M.Si

LEMBAR PERSETUJUAN

**EKSISTENSI KOPERASI SANTRI DI DALAM PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN PESANTREN
(Study Kasus di Pondok Pesantren An Nuur II Bululawang Malang)**

SKRIPSI

O l e h

SANIN

NIM: 01160022

Telah Disetujui, 4 April 2008
Dosen Pembimbing,

Ni'matuz zuhro, M.Si

NIP: 150377251

Mengetahui :
Ketua Jurusan Pendidikan IPS,

Drs. Muh. Yunus, M.Si.

NIP : 150276940

HALAMAN PENGESAHAN
EKSISTENSI KOPERASI SANTRI DI DALAM
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PESANTREN
(Study Kasus di Pondok Pesantren An Nuur II Bululawang Malang)

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Sanin (01160022)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal, 17 04 2008
dengan nilai B

Dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar strata satu Pendidikan Ilmu Sosial (S.Pd.)
Pada tanggal 29 April 2008

Panitia Ujian

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs.Rasmiyanto,M.Ag.

Ni'matuz Zuhro., M.Si

NIP:150287838

NIP:150377251

Penguji Utama,

Pembimbing,

Abdul Basith, M.Si

Ni'matuz Zuhro., M.Si

NIP:150327264

NIP:150377251

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang

Prof. Dr. H.M. Djunaidi Ghony

NIP. 150 042 031



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayahandadengan segala pengorbanannya, Ananda hanya dapat

membalas dengan doa dan berharap Ridlo-Nya untukmu

Ibunda tercinta..... yang dengan penuh ketabahan dan kesabaran telah

membesarkan serta mendidik kami

Kakak-kakakku tercinta dan tersayang, Andi suhaimu dan Ani riskiya,

As'ary dan Rudiana, serta ponaanku Roky prayoga dan Nita ervina

prayunita. dan Spesial buat Ibu Pembimbingku Ni'matuz

Zuhroh.M.Si.

yang dengan sabar mendukung, membantu, mendidik kami dengan

penuh Telaten dan Kesabaran(tank's Ibu.) hanya Allah yang dapat

membalas kebaikan ibu. buat kekasihkhayalanku Llia yang telah

banyak memberi motivasi (tank's sayang.)

Sahabat-sahabatku "Se profesi (PB)" Tobiel,Ilunk,Wins dan teman-temanku

yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu.

HALAMAN MOTTO

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

(QS. Al-Maidah: 2)



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, April 2008

Sanin



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabby, Tuhan penguasa jagad raya yang sangat luas ini, atas Rahmat, Karunia, Hidayah dan Inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Eksistensi Koperasi Santri Di Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Pesantren (Study Kasus di Pondok Pesantren An Nuur II Bululawang Malang).**

Shalawat dan Salam semoga senantiasa Allah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW pembawa misi perjuangan mentauhidkan Allah SWT.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. Imam Suprayogo selaku Rektor UIN Malang beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan, pelayanan dan bimbingan untuk menyelesaikan studi di UIN Malang Fakultas Tarbiyah Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial.
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Djunaidi Ghony selaku Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang
3. Bapak Drs.M. Yunus, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Malang
4. Ibu Ni'matuz Zuhroh, M.Si. yang dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab telah memberikan petunjuk, bimbingan, dukungan serta arahan dalam melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini.

5. Ketua Koperasi Pondok Pesantren An Nuur II beserta jajarannya yang telah memberikan bimbingannya selama penulis mengadakan penelitian hingga selesai penyusunan skripsi ini.

6. Sahabat-sahabatku serta semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teriring do'a, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridlo-Nya. Amin...

Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi, sistematika pembahasan maupun dari segi analisa dan susunan bahasanya. Oleh karena itu, kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak senantiasa penulis harapkan dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini ada guna dan manfa'atnya baik bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin...

Malang, 6 April 2008

Penulis

Sanin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PERSETUJUAN

LEMBARAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Rumusan Masalah 5
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan penelitian..... ..
- E. Sistematika pembahasan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

- A. Koperasi di Indonesia..... 8
 - 1. Fungsi dan peran Koperasi..... 12
 - 2. Prinsip Koperasi..... 13
 - 3. Jenis-jenis koperasi menurut UU No. 25 Perkoprasian..... 13
 - 4. Sumber modal koperasi..... 14
 - 5. Mekanisme pendirian koperasi..... 15
 - 6. Perangkat organisasi koperasi..... 16
 - 7. Landasan koperasi..... 17

B. Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan	
1. Pengertian pesantren.....	24
2. Sejarah Timbulnya Pesantren.....	32

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	41
B. Kehadiran peneliti.....	42
C. Lokasi penelitian.....	42
D. Data penelitian.....	43
E. Prosedur pengumpulan data.....	44
F. Analisis data.....	46
G. Pengecekan keabsahan data.....	47

BAB IV: PAPARAN DATA

A. Profil lokasi penelitian.....	49
1. Sejarah pesantren An-Nur II Al Murtadho.....	49
2. Tujuan umum pesantren.....	52
3. Tujuan khusus pesantren.....	53
B. Peranan Koprasi Santri Dalam Rangka Membangun dan Mengembangkan Pondok Pesantren An-Nur II.....	53

BABV: PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

A. Koprasi Santri Dan Pengembangan Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang.....	60
---	----

BAB VI : PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Sanin. 2008. Eksistensi Koperasi Di Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang Malang). Skripsi, Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial. Fakultas Tarbiyah. Universitas Islam Negeri Malang.

Pembimbing: Ni'matuz Zuhroh, M.Si

Kata Kunci: Eksistensi, Koperasi Santri, Pembangunan, Pengembangan, Pesantren An-Nur II

Koperasi telah mengembangkan “sayapnya” sampai kepada lembaga-lembaga pendidikan. Pengembangan yang dilakukan oleh koperasi adalah suatu usaha konkrit untuk membuktikan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang dapat diterima dan diterapkan oleh semua lapisan masyarakat. Selain merambah ke dunia pendidikan formal, koperasi juga ternyata diminati oleh lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti pondok pesantren. Keberadaan koperasi di dalam lembaga pondok pesantren paling tidak dapat dilihat dalam dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan pemberdayaan santri pondok pesantren. *Kedua*, pembangunan dan pengembangan pesantren. Keberadaan koperasi santri seharusnya memberi kontribusi praktis terhadap pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, maka pembangunan dan pengembangan pesantren merupakan suatu keniscayaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas yaitu untuk mengetahui peranan koperasi santri dalam rangka membangun dan mengembangkan Pondok Pesantren An-Nur II. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi pondok pesantren memiliki peran yang signifikan di dalam pembangunan dan pengembangan Pondok pesantren. Hal ini terlihat di Pondok Pesantren An Nur II Bululawang. Dari hasil Sisa Hasil Usaha Koperasi Pondok Pesantren “An Nuur II Al-Murtadho”, Pesantren An Nuur II terus melakukan pembangunan dan pengembangan pondok, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Pengembangan pesantren secara kuantitas, terlihat dari pembangunan fisik yang dari tahun ke tahun terus memperlihatkan peningkatan dan pemenuhan kebutuhan santri yang tinggal didalam atau disekitar pesantren. Adapun secara kualitas, An Nuur terus mengembangkan pengaruh dan *responsibility*nya untuk tetap peduli dengan keadaan masyarakat sekitar. Hal ini ditunjukkan dengan pengadaan bidang usaha kopontren di bidang jasa yang berupa Unit Simpan Pinjam dan Tebu Rakyat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan koperasi di berbagai bagian dunia cenderung berbeda-beda. Perkembangan koperasi di Negara-negara Eropa Barat dan Jepang misalnya, telah memasuki tahap perkembangan yang sangat maju. Di kedua wilayah ini, koperasi telah berkembang menjadi salah satu pelaku ekonomi yang mampu bersaing secara wajar dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Kenyataan yang berlainan kita jumpai di Asia Selatan dan Tenggara. Perkembangan koperasi di wilayah ini boleh dikatakan belum mampu bersaing secara sehat dengan badan-badan usaha yang lain.¹

Meskipun demikian, di negeri kita sejarah pengenalan koperasi didorong oleh keyakinan para Bapak Bangsa untuk mengantar perekonomian Bangsa Indonesia menuju pada suatu kemakmuran dalam kebersamaan dengan semboyan “Makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran”. Kondisi obyektif yang hidup dan pengetahuan masyarakat kita hingga tiga dasawarsa setelah kemerdekaan memang menghendaki cara itu. Persoalan pengembangan koperasi di Indonesia sering dicemooh seolah sedang menegakkan benang basah. Pemerintah di negara-negara berkembang memainkan peran ganda dalam pengembangan koperasi dalam fungsi *regulatory* dan *development*. Peran *development* tidak jarang justru tidak mendewasakan koperasi. Di sisi lain, koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian

¹ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2000), hal. 35

Indonesia. Hal itu tidak hanya tampak pada amanat Pasal 33 UUD 1945 serta keberadaan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dalam struktur pemerintahan, tetapi dapat pula disimak berdasarkan kondisi riil perekonomian Indonesia. Untuk hal ini, pemerintah telah bertekad untuk melakukan langkah dan kebijaksanaan strategis, agar perekonomian nasional dapat semakin tumbuh dan berkembang secara wajar dan proporsional. Komitmen tersebut dilakukan dengan memprioritaskan pemberdayaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, ihwal dan seluk beluk tentang koperasi, perlu terus diinformasikan kepada masyarakat luas. Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi, akan semakin dapat difahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk mengaktualisasikan komitmen tersebut, pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui wadah koperasi. Sebagai wadah pengembangan usaha, koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus menumbuhkan semangat kehidupan demokrasi ekonomi dalam masyarakat. Pada dasarnya pemerintah telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendirikan koperasi. Masyarakat lebih leluasa untuk menentukan skala/jenis usaha koperasi sesuai dengan kepentingan anggota, tanpa terikat pada nama dan wilayah kerja koperasi.²

Dengan mengembalikan koperasi pada fungsinya (sebagai gerakan ekonomi) atas prinsip dan nilai dasarnya, koperasi akan semakin mampu

² [http: Dinas Koperasi & Pengusaha Kecil Menengah](http://DinasKoperasi&PengusahaKecilMenengah)

menampilkan wajah yang sesungguhnya menuju keadaan “Bersama dalam kesejahteraan” dan “Sejahtera dalam kebersamaan”. Hal ini terlihat dengan fakta bahwa, meskipun koperasi banyak bergulat dengan unit-unit usaha baik yang swasta maupun yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi telah mengembangkan “sayapnya” sampai kepada lembaga-lembaga pendidikan. Pengembangan yang dilakukan oleh koperasi adalah suatu usaha konkrit untuk membuktikan, bahwa koperasi sebagai badan usaha yang dapat diterima dan diterapkan oleh semua lapisan masyarakat. Kita mungkin dapat mengambil contoh di beberapa lembaga pendidikan formal terdapat koperasi siswa (pelajar) dan koperasi mahasiswa (Kopma) bagi pendidikan tinggi atau Universitas.

Selain merambah ke dunia pendidikan formal, koperasi juga ternyata diminati oleh lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti pondok pesantren. Marwan Saridjo seorang pemerhati pesantren menjelaskan, bahwa dalam sejarah pertumbuhan pondok pesantren telah mengalami lima (5) fase perkembangan terutama ditinjau dari bangunan fisiknya. Pada fase *keempat*, dia menjelaskan bahwa selain memiliki komponen-komponen fisik (seperti masjid dan asrama), pesantren juga memiliki sarana sebagai suatu tempat pendidikan keterampilan seperti: peternakan, pertukangan, sawah ladang, koperasi dan sebagainya. Koperasi merupakan salah satu dari tanda perkembangan sebuah pesantren.³

Dari paparan di atas, maka penelitian akan keberadaan pesantren baik sebagai wadah pelatihan *skill* maupun sebagai badan usaha dalam sebuah lembaga pendidikan, menjadi suatu keniscayaan. Keberadaan koperasi di dalam lembaga

³ Saridjo Marwan, Abd. Rahman Saleh dan Musthafa Syarif, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1979), hal.. 10

pondok pesantren paling tidak dapat dilihat dalam dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan pemberdayaan santri pondok pesantren. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata "*power*" yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana seseorang, rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.⁴ Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan usaha dalam rangka kompetisi dan *survive*. Keterlibatan para santri di dalam koperasi santri, memperlihatkan adanya indikasi pemberdayaan santri.

Kedua, pembangunan dan pengembangan pesantren. Keberadaan koperasi santri seharusnya memberi kontribusi praktis terhadap pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, maka pembangunan dan pengembangan pesantren merupakan suatu keniscayaan.

Berdasarkan dua pendekatan di atas, maka penelitian ini mendapatkan signifikansinya. Karena secara praktis ingin melihat keterlibatan koperasi dalam pembangunan dan pengembangan pesantren, dan terutama didalam memenuhi kebutuhan para santri di lingkungan pesantren (baik secara fisik maupun non fisik).

Pondok Pesantren An Nuur II yang berlokasi di Bululawang Malang, sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai sebuah koperasi sebagai salah satu unit usaha, koperasi pesantren memiliki peranan ganda. Pertama, koperasi pesantren bertujuan untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan

⁴ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 35

pondok pesantren, dan kedua, koperasi pesantren bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para santri dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, keberadaan koperasi dalam lingkungan pondok pesantren sangat menarik sekali untuk diteliti, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan bagi para santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren An Nuur II Bululawang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimanakah peranan koperasi santri dalam rangka membangun dan mengembangkan Pondok Pesantren An Nuur II?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas yaitu untuk mengetahui peranan koperasi santri dalam rangka membangun dan mengembangkan Pondok Pesantren An Nuur II.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah *hazanah* yang akan memperkaya wacana keilmuan di bidang perkoperasian, khususnya kepada mahasiswa Ilmu Pengetahuan Sosial dan seluruh lapisan masyarakat yang sangat peduli dengan keberadaan koperasi.
2. Secara teoritis, penelitian ini merupakan bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan masalah ini.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan membahas kajian teoritis seputar koperasi yang meliputi: pengertian, sejarah, landasan, asas, tujuan koperasi, prinsip dan macam-macam koperasi. Selain itu, bab ini juga akan membahas tentang koperasi sebagai badan usaha. Untuk kelengkapan landasan teori, maka penjelasan tentang pola pengembangan usaha koperasi menjadi salah satu pembahasan dalam bab ini. Selain teori koperasi, bab ini juga akan membahas tentang Pesantren, dari pengertian serta sejarahnya.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam Bab ini akan dipaparkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : Paparan Data

Bab ini akan memaparkan temuan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, yang terdiri dari profil lokasi penelitian dan peran koperasi Santri dalam pembangunan dan pengembangan Pondok Pesantren An Nuur II.

BAB V : Analisis Data

Bab ini akan memaparkan analisis tentang peran koperasi santri didalam pembangunan dan pengembangan Pondok Pesantren An Nuur II.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisikan penutup yang mencakup Kesimpulan dan Saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Koperasi di Indonesia

Revrisond Baswir mendefinisikan koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi, yang di dalamnya merupakan wadah kerja sama yang dibentuk dari, oleh dan untuk anggota, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.⁵

Istilah koperasi sendiri berasal dari bahasa asing *Co – Operation* (*Co* = bersama, *Operation* = usaha). Jadi secara sederhana dapat kita pahami bahwa koperasi adalah usaha bersama, seperti KUD (Koperasi Unit Desa), dan lain-lain. Awal mulanya koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan biaya yang relatif murah, itulah yang dituju. Dengan demikian, koperasi lebih mengedepankan kepentingan bersama lebih keuntungan semata/*profit oriented*.⁶

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa kemakmuran lebih daripada kemakmuran perorangan.

⁵ Revrisond Baswir, *Pembangunan tanpa Pemerasan; Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta: ELSAM, 2000), hal. 2

⁶ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPF, 2000), hal. 2

Menurut Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 Bab I Pasal 1 Butir 1 (pengaturan kembali Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian) bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu:

1. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi;
2. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.

Definisi di atas juga menjelaskan bahwa koperasi Indonesia mengandung lima (5) unsur sebagai berikut:

1. Koperasi adalah badan usaha (*Business Enterprise*).

Sebagai badan usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, dimana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.

2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan badan-badan hukum koperasi.

Artinya bahwa koperasi Indonesia bukan kumpulan modal, dalam hal ini Undang-Undang Koperasi Bab VII No. 25 Tahun 1992 Pasal 6 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang) untuk koperasi primer dan 3 badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

3. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan dengan prinsip-prinsip koperasi.

4. Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat.

Ini berarti bahwa, koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.

5. Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan.

Dengan asas ini keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari asas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktifitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.⁷

Dari beberapa definisi dan unsur-unsur dasar koperasi di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan. Penjelasan di atas juga menjelaskan perbedaan yang cukup signifikan antara koperasi dengan kegiatan ekonomi non koperasi. Dalam hubungan ini beberapa dimensi yang digunakan sebagai variabel yang memperjelas perbedaan yang dimaksud, yaitu antara lain: Dimensi kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan usaha, dimensi usaha, dimensi ketatalaksanaan usaha, dimensi dasar keyakinan usaha, dimensi kemanfaatan usaha, dimensi modal kerja, dimensi pembagian sisa hasil usaha (surplus), dimensi sikap terhadap pasar dan dimensi tujuan usaha.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat kita pahami betapa pentingnya peranan koperasi sebagai kegiatan perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya memiliki arti penting bagi anggotanya, melainkan juga memiliki peranan

⁷ Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktek* (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 18

yang sangat penting bagi anggota masyarakat di sekitarnya, serta bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

1. Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

2. Prinsip Koperasi

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoprasian
- g. kerjasama antar koperasi

3. Jenis-jenis Koperasi menurut UU No. 25 Perkoperasian

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.

- a. Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam Adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
- b. Koperasi Konsumen. Koperasi Konsumen Adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.
- c. Koperasi Produsen. Koperasi Produsen Adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
- d. Koperasi Pemasaran. Koperasi Pemasaran Koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya
- e. Koperasi Jasa. Koperasi Jasa Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

4. Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

a) **Simpanan Pokok.**

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

b) **Simpanan Wajib**

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

c) **Dana Cadangan**

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

d) Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Adapun modal pinjaman dapat berasal dari:

1. Anggota
2. Koperasi lain
3. Bank
4. Penerbitan Obligasi dan surat berharga lain

5. Mekanisme Pendirian Koperasi

Mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap. Pertama-tama adalah pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 anggota. Kedua, Para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota, untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi (ketua, sekretaris, dan bendahara). Setelah itu, koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan rumah tangga koperasi itu. Lalu meminta perizinan dari negara. Barulah bisa menjalankan koperasi dengan baik dan benar.

6. Perangkat Organisasi Koperasi

1. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu, termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas, menetapkan Anggaran Dasar, menetapkan kebijakan

umum dibidang, organisasi, manajemen dan usaha koperasi, melaksanakan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kerja, penesahan laporan keuangan, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, menetapkan pembagian SHU, Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

2. Pengurus

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai dan disertai mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik dibidang organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Atas persetujuan rapat anggota pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi. Namun pengurus tetap bertanggung jawab pada rapat anggota.

3. Pengawas

Pengawas adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas dipilih oleh anggota koperasi di rapat anggota. Dalam pelaksanaannya, pengawas berhak mendapatkan setiap laporan pengurus, tetapi merahasiakannya kepada pihak ketiga. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Adapun wewenang pengurus adalah mewakili koperasi didalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota koperasi, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan keuntungan koperasi, bertanggungjawab atas pengelolaan koperasi, mengangkat

pengelola yang diberi wewenang dan kekuasaan untuk mengelola koperasi (manager Koperasi yang bertanggungjawab pada Pengurus)

7. Landasan Koperasi

Undang-Undang Dasar 145 menempatkan Koperasi pada kedudukan sebagai sakaguru perekonomian nasional. Selain di atur di dalam UUD 1945, Koperasi juga diatur dalam Undang-undang tersendiri yang secara spesifik membicarakan eksistensi Koperasi. Dalam Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 (perubahan Undang-Undang Perkoperasian yang baru dari Tahun 1967) dinyatakan bahwa landasan dan asas koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁸

Adapun landasan koperasi di Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi adalah Pancasila, penempatan Pancasila sebagai landasan koperasi Indonesia didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Landasan Struktural

Selain menempatkan Pancasila sebagai landasan idiil koperasi Indonesia, Bab II Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menempatkan

⁸ Revrisond Baswir, Op.cit., hal. 36

Undang-Undang dasar 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia, karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 telah diterangkan bahwa “Perekonomian disusun bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, maka badan usaha yang cocok dan sesuai dengan asas kekeluargaan adalah koperasi, karena itu koperasi harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pembangunan.

Berbicara tentang ekonomi koperasi tidak terlepas dari konsep ekonomi dan koperasi. Ekonomi secara umum diartikan sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, sedang koperasi (sebagaimana beberapa definisi sebelumnya) adalah badan usaha atau organisasi dimana anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan dan ini merupakan sebagai prinsip atau kriteria identitas yang membedakannya dengan badan usaha atau organisasi ekonomi lainnya. Ekonomi koperasi membahas tentang peranan ilmu ekonomi dalam mengembangkan Koperasi. Ilmu ekonomi yang dimaksud terutama dari ekonomi mikro, dimana koperasi dipandang sebagai unit usaha yang mempunyai tujuan ekonomi. Ekonomi koperasi menyoroti pola pengambilan keputusan anggota untuk tetap berada dalam koperasi atau keluar dari koperasi. Anggapan dasar yang digunakan adalah bahwa anggota akan tetap berada dalam koperasi atau keluar dari koperasi, atau anggota potensial masuk menjadi anggota koperasi bila mereka menganggap secara subyektif koperasi memberikan manfaat (nilai) yang lebih

besar daripada organisasi lainnya. Manfaat lebih ini pula yang memberikan dorongan anggota untuk berpartisipasi aktif dalam koperasi.⁹

Partisipasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Dalam koperasi, anggotalah yang menjadi titik awal yang menentukan proses partisipasi berlangsung. Sebagai pemilik, anggota menginginkan koperasi menjadi sumber yang mampu meningkatkan usaha individualnya.

Kalau melihat sejarah koperasi, koperasi ekonomi muncul dalam sejarah kebudayaan manusia sebagai reaksi terhadap kondisi kehidupan modern. Lembaga ini dimunculkan atas kesadaran faktual dari pelakunya. Bahkan oleh J.K. Golbraith, disebutnya sebagai “counterveiling power” atau kekuatan pengimbang, yaitu semacam kekuatan yang ditimbulkan oleh pihak kedua yang disebabkan oleh tekanan-tekanan dari pihak pertama.¹⁰

Kekuatan tersebut menghendaki adanya unsur, seperti juga terdapat dalam kerjasama sosial, yaitu suatu kesadaran akan harga diri pada anggota-anggotanya serta solidaritas. Solidaritas inilah yang nanti pada akhirnya berguna untuk mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar, dengan menarik manfaat sebesar-besarnya dari suatu suasana hidup berkumpul. Bentuk kerjasama yang mengandung aspek ekonomis dan sosial dan merupakan bentuk kerjasama untuk menolong terutama diri sendiri dengan cara bersama-sama yang dilandasi dengan rasa kekeluargaan.¹¹

⁹ Hendar, *Ekonomi Koperasi* (Jakarta: LP Fakultas Ekonomi UI, 2005), hal. v

¹⁰ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 3

¹¹ Ibid., hal. 4

Ada tiga pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai eksistensi unit usaha Koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia. *Pertama*, pendapat yang menekankan perlunya pengkajian ulang tentang eksistensi koperasi sebagai unit usaha dalam kegiatan ekonomi. Secara implisit pendapat ini menghendaki agar eksistensi koperasi sebagai unit usaha ekonomi tidak perlu dipertahankan lagi. Pendapat ini mewakili pemikiran kanan yang tidak begitu mempermasalahkan konsentrasi kekuasaan ekonomi di kalangan segelintir orang dalam masyarakat dan tidak menghendaki adanya pertanda pandangan populis di dalam masyarakat. *Kedua*, pendapat yang memandang bahwa koperasi perlu dipertahankan secara wajar. Dalam alur pemikiran ini, unit usaha koperasi dipandang perlu untuk dipertahankan karena telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan ini paling tidak diwakili oleh para *stakeholder* atau birokrat. *Ketiga*, pendapat yang selalu dilontarkan oleh kalangan intelektual yang berideologi kerakyatan. Kalangan ini memandang unit usaha koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang harus dikembangkan menjadi unit usaha yang kukuh dalam rangka demokrasi ekonomi. Pendapat ini berdasarkan atas cita-cita kemerdekaan Indonesia.¹²

Terlepas dari ketiga pendapat yang berkembang di atas, pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia ini harus diartikan sebagai perkembangan ekonomi rakyat dengan segala aspek kehidupan mereka (ekonomi, politik, harga diri, kepercayaan diri, kreativitas, solidaritas antar sesama, kemerdekaan yang berfungsi sosial dan lain-lain). Oleh karena negara-negara yang berkembang pada

¹² Sritua Arif, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia: Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002), hal. 103

umumnya termasuk Indonesia masih mengandung struktur sosial yang pincang, maka pengembangan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan fundamental dalam struktur sosial dan penguasaan aset ekonomi. Jadi mutlak dilakukan restrukturisasi sosial, terutama restrukturisasi penguasaan (pemilikan) aset ekonomi.¹³

Pemikiran di atas paling tidak dapat dibuktikan ketika krisis ekonomi yang melanda Indonesia, mulai tahun 1997 yang menimbulkan akibat buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta memiliki konsekuensi sosial-ekonomi dan politik yang cukup besar, dampak sosial-ekonomi yang terjadi memiliki peningkatan angka pengangguran, peningkatan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM), dan kerentanan struktur sosial sebagai akibat hilangnya pekerjaan dan kemampuan Rumah Tangga Miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dampak sosial politik dan krisis juga mendorong pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, mulai dari proses pengkajian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelestariannya.

Sehingga pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi koperasi adalah upaya untuk membangun daya (manusia) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat pada umumnya adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

¹³ Ibid., hal. 191

Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai ketahanan nasional. Memberdayakan manusia berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.¹⁴

Paling tidak terdapat beberapa dampak yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi suatu koperasi, terutama bagi pembangunan negara. Dampak terhadap pembangunan yang ditimbulkan oleh kebanyakan atau semua koperasi yang bergerak dalam suatu sektor, daerah atau negara tertentu merupakan dampak yang teragregasi dan karena itu disebut dampak yang bersifat makro, sedangkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu koperasi tertentu disebut dampak mikro.

Adapun dampak mikro dari koperasi, dapat dibedakan menjadi,

- a. Dampak langsung, terhadap para anggota dan perekonomiannya, yang merupakan akibat dari peningkatan pelayanan perusahaan koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi. Dampak langsung timbul jika suatu perusahaan koperasi, menawarkan kepada para nggotanya, misalnya Petani, jasa-jasa pelayanan yang secara efektif meningkatkan kegiatan usaha mereka, melalui usaha perkreditan, pengadaan, pemasaran, konsultasi dan sebagainya. Dengan beberapa pelayanan tersebut, mereka mampu *pertama*, menerapkan metoda-metoda produksi yang inovatif, yang memungkinkan peningkatan produktivitas dan hasil produksi yang

¹⁴ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta, BPFE, 2000) hal. 263-264

lebih besar, serta *kedua*, melakukan spesialisasi dalam proses produksi.

- b. Dampak tidak langsung yang timbul karena eksistensi dan kegiatan-kegiatan koperasi terhadap lingkungan dari kombinasi usaha koperasi. Hal ini seringkali berlangsung tanpa disengaja dan tidak diakui sebagai hasil kegiatan koperasi para anggota, manajer dan lembaga-lembaga pengembangan swadaya.

Misalnya dampak koperasi yang bersifat kompetitif. Pembentukan koperasi dalam situasi pasar yang ditandai oleh suatu persaingan, akan memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan mereka.

Akibatnya, timbul dampak-dampak positif terhadap struktur pasar, intensitas persaingan, dan mungkin pula terhadap peningkatan pangsa pasar, yang pada gilirannya akan memberikan dorongan positif ke arah pertumbuhan ekonomi.¹⁵

C. Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan

1. Pengertian Pesantren

Pesantren atau pondok adalah lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari segi historisnya pesantren tidak hanya identik dengan makna ke-islaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*). Sebab, lembaga yang serupa pesantren ini sebenarnya sudah ada sejak pada masa kekuasaan Hindu-Budha.

¹⁵ Alfred Hanel, *Organisasi Koperasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 151-155

Sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada.

Pondok pesantren berasal dari dua kata yang membentuk satu pengertian yang sama. Pondok berarti tempat menumpang sementara, pesantren berarti tempat para santri, sedangkan santri berarti pelajar yang menuntut ilmu agama Islam. Di Jawa tempat ini disebut pondok dan pesantren. Menurut penulis bahwa antara pondok dan pesantren tidak ada sebutan yang berarti, karena keduanya merujuk kepada satu pengertian yang sama. Sebutan pondok Krapyak, pondok Tebuireng, pondok Termas, atau pondok pesantren Termas, pesantren Tebuireng, atau pesantren Krapyak tidak menunjukkan perbedaan makna.

Secara etimologi perkataan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bamboo. Disamping itu kata pondok juga berasal dari bahasa Arab "*funduq*" yang berarti hotel atau asrama. Sedangkan perkataan pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan '*pe*' dan akhiran '*an*' mempunyai arti sebagai tempat tinggal para santri. Kata santri sendiri menurut C.C Berg, berasal dari istilah "*Shastri*" yang diambil dari kata bahasa India yang bermakna orang-orang yang mengetahui kitab-kitab Hindu atau seseorang sarjana ahli kitab-kitab suci Hindu.¹⁶ Chature-Verdi dan Tiwario (1970) mengatakan bahwa kata santri berasal dari kata "*shastra*" yang berarti buku suci tentang ilmu pengetahuan. Sementara Geertz, mengartikan kata sansakerta *shastri* dengan makna ilmuan Hindu yang pandai menulis, yang telah diadaptasi menjadi kata santri dan dapat digambarkan dalam makna yang sempit maupun makna yang

¹⁶ T.H. Gibb, *Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta, 1932), hal. 257

luas. Dalam artian sempit santri bermakna seorang pelajar sekolah agama yang bermukim di suatu tempat yang disebut pondok atau pesantren. Sedangkan dalam artian luas dan lebih umum kata santri mengacu pada identitas seseorang sebagai bagian dari varian komunitas penduduk Jawa yang menganut Islam secara konsekuen, yang sembahyang dan pergi ke masjid jika hari Jum'at dan sebagainya.¹⁷

Pengambilan Nama santri dari kata *shastri* yang berasal dari India (sansekerta) cukup masuk akal, mengingat bahwa penyebar agama Islam di Indonesia sebagian berasal dari Gujarat India¹⁸ dimana tokoh penyebar Islam yang pertama kali merintis berdirinya pesantren di Jawa adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama yang berasal dari Gujarat, India. Agaknya Maulana Malik Ibrahim mengadaptasi bentuk lembaga pendidikan pra-Islam yang sudah ada di Jawa, yaitu lembaga pendidikan asrama atau padepokan yang merupakan sistem biara yang dipakai oleh para pendeta atau biksu menjalankan proses belajar dan mengajar.¹⁹

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Pesantren sendiri menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri.²⁰ Secara terminologi dapat dijelaskan bahwa pendidikan pesantren dilihat dari segi

¹⁷ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), hal. 178

¹⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980)

¹⁹ Nur Kholis Madjid, *Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 1

²⁰ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), hal. 6

bentuk dan sistemnya berasal dari India, sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, system tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa, setelah Islam masuk di Jawa, sistem tersebut diambil oleh Islam. Istilah pesantren sendiri seperti lainnya mengaji bukanlah dari istilah Arab, melainkan dari India. Demikian juga istilah pondok, Langgar di Jawa, Suarau di Minangkabau dan Rangkan di Aceh.

Walaupun begitu pesantren tidak Sama dengan padepokan ala Hindu. Orang-orang belajar atau mengajar dipadepokan hanya kasta-kasta tertentu, yaitu Brahmana dan Ksatria. Di pondok pesantren semua orang tidak dibeda-bedakan. Semua santri dapat belajar dengan mudah.

Pada dasarnya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dilaksanakan dengan siste asrama dengan kyai sebagai sentral utama serta masjid sebagai pusat lembaganya. Dalam studinya, Raharjo (1995) menyimpulkan, bahwa sejak awal pertumbuhannya, pesantren memiliki bentuk yang beragam, sehingga tidak ada suatu standarisasi yang berlaku bagi semua pesantren.²¹ Namun demikian dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pesantren tampak adanya pola umum yang diambil dari makna peristilahan pesantren itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu pola tertentu suatu sumber.²²

Pada awalnya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya diberikan dengan secara non-klasikal (sistem pesantren). Dimana seorang kyai mengajarkan santri-santrinya

²¹ Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 45

²² Agus Sunyoto, *Sunan Ampel* (Surabaya, 1990), hal. 12

(siswa-siswi) berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar dari abad pertengahan (abad ke-12 s/d abad ke-16). Para santri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama dalam pesantren tersebut. Namun demikian pada awalnya pesantren tidak memiliki pondok atau asrama. Sehingga para santri yang belajar harus tinggal menyebar di desa-desa yang ada di sekitar pesantren tersebut. Para santri yang demikian itu disebut *santri kalong*, yang mengikuti pelajaran di pesantren secara *wetonan*, dimana mereka datang berduyun-duyun kepesantren pada waktu tertentu yang ditentukan, untuk mengikuti pelajaran. (Mas'udi, 1985).

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang dikelola seutuhnya oleh kyai dan santri keberadaan pesantren pada dasarnya berbeda di berbagai tempat baik kegiatan maupun bentuknya.²³ Meski demikian secara umum dapat dilihat adanya pola yang sama pada pesantren, persamaan pola tersebut oleh Mukti Ali dapat dibedakan dari dua segi, segi *pertama*, adalah segi fisik yang terdiri dari empat komponen pokok yang selalu ada pada setiap pesantren, yaitu:

1. Kyai sebagai pemimpin, pendidik, guru dan panutan.
2. Santri sebagai peserta didik atau siswa
3. Masjid sebagai tempat penyelenggara pendidikan, pengajaran dan peribadatan.
4. Pondok sebagai asrama untuk mukim santri.

Sedangkan segi *kedua*, adalah segi komponen non fisik yaitu pengajaran (pengajaran agama) yang disampaikan dengan berbagai metode yang secara

²³ Ibid, hal. 13

umum memiliki keseragaman, yakni standarisasi tentang kerangka sistem nilai baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan dan perkembangan pondok pesantren.

Dalam sejarah pertumbuhan pondok pesantren telah mengalami beberapa fase perkembangan terutama ditinjau dari bangunan fisiknya sebagai berikut:

Pertama : Hanya terdiri dari rumah kyai, dimana kyai mempergunakan masjid atau rumahnya sebagai tempat mengajar para santri yang umumnya datang dari daerah sekitarnya, tipe pondok seperti ini masih sederhana sekali.

Kedua : Selain masjid dan rumah kyai, pondok pesantren ini telah memiliki asrama tempat menginap para santri yang datang dari daerah jauh.

Ketiga : Selain masjid dan asrama, dengan sistem pendidikan *weton dan sorogan*, pondok pesantren tipe ketiga ini telah menyelenggarakan pendidikan formal, seperti Madrasah dan yang sejenisnya.

Keempat : Selain memiliki komponen-komponen fisik seperti pada pola ketiga ia juga memiliki sarana sebagai tempat pendidikan keterampilan seperti: peternakan, pertukangan, sawah lading, koperasi dan sebagainya.

Kelima : Pada tipe ini merupakan pondok pesantren yang telah maju, yang disebut dengan pondok pesantren modern. Dimana tersedianya sarana yang memadai, baik sarana fisiknya Maupun non fisiknya misalnya kegiatan keterampilan, juga menyelenggarakan sekolah-sekolah menengah pertama atau menengah atas, baik agama maupun umum

(Tsanawiyah, Aliyah, SMP, SMU, SMEA) bahkan perguruan tinggi, tersedianya perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor administrasi, rumah penginapan (untuk wali santri dan umum) ruang *operation room* dan sebagainya.

Usaha untuk mengidentifikasi pesantren dilakukan juga oleh Kafrawi. Ia mencoba membagi pola pesantren menjadi empat pola.²⁴ yaitu:

pola I ialah pesantren yang memiliki unit kegiatan dan elemen berupa masjid dan sejumlah kyai. Pesantren ini masih sederhana; kyai mempergunakan masjid atau rumahnya untuk tempat mengaji, biasanya santri datang dari daerah sekitarnya, namun pengajian telah diselenggarakan secara bertahab dan sistematis. Jadi pola dengan elemen dasar dari Zamakhsyri.

pola II Sama dengan pola I ditambah adanya pondokan bagi santri. Ini sama dengan syarat Zamakhsyri.

pola III Sama dengan pola II tetapi ditambah adanya madrasah. Jadi di pesantren pola III ini telah ada pengajian system klasikal.

pola IV ialah pesantren pola III ditambah adanya unit keterampilan seperti peternakan, kerajinan, koperasi, sawah ladang dan lain-lain.

Dalam teori kafrawi ini cukup berharga untuk digunakan dalam mengidentifikasi pesantren, sekaligus, mungkin dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pesantren. Dan menurut penulis, bahwa ada beberapa pondok pesantren kalau dilihat dari sudut pengetahuan yang diajarkan, dapat dibagi dua macam, yaitu:

²⁴ Saridjo Marwan, Abd. Rahman Saleh dan Musthafa Syarif, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1979), hal. 10

Pertama : Pesantren *salafi*, yaitu pesantren yang mengajarkan kitab-kitab Islam klasik, sistem klasikal diterapkan untuk mempermudah metode pengajaran disamping metode ceramah dan Tanya jawab.

Kedua : Pesantren *khalafi*, yaitu pesantren yang, mengajarkan kitab-kitab Islam klasik, disamping dengan sistem metode ceramah dan Tanya jawab, juga membuka sekolah umum dilingkungan pesantren dan dibawah tanggung jawab yayasan pondok pesantren.

Selain itu di dalam kehidupan pesantren tertanam *ghirah diniyyah* (rasa keagamaan yang kuat). Ghirah diniyyah ini secara otomatis mewarnai seluruh aktifitas belajar dan kehidupan para santri, sehingga membentuk suatu tata kehidupan yang khas pesantren. Kehidupan pesantren yang khas ini telah terbukti mampu menanamkan jiwa dan mentalitas yang positif kepada pribadi-pribadi para santrinya.

Selama beberapa abad pondok pesantren dikenal sebagai tempat pendidikan yang sangat berharga bagi umat Islam. Dari pesantren telah muncul kader-kader mubaligh dan pemimpin umat dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam pendidikan itulah terjalin jiwa yang kuat yang sangat menentukan filsafat hidup para santri. Itulah sebab mengapa lembaga pendidikan pesantren dapat tumbuh, berkembang dan bahkan bertahan lama.

Untuk itu, mempertahankan ciri khas pesantren didalam kehidupan pondok sekurang-kurangnya terdapat dan diusahakan tertanam lima jiwa pesantren yang kemudian disebut "*panca jiwa*", yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah dan kebebasan.

Lembaga-lembaga pesantren itulah yang paling menentukan watak keislaman dari kerajaan-kerajaan Islam, dan yang memegang peranan paling penting bagi penyebaran Islam sampai ke pelosok-pelosok, dari lembaga-lembaga pesantren itulah asal usul sejumlah manuskrip tentang pengajaran Islam di Asia Tenggara, yang tersedia secara terbatas, yang dikumpulkan oleh para pengembara pertama dari pedagang-pedagang Belanda dan Inggris sejak akhir abad XVI Masehi. Untuk dapat betul-betul memahami sejarah islamisasi di wilayah ini, kita harus mulai mempelajari lembaga-lembaga yang jadi anak panah penyebaran Islam di wilayah ini.²⁵

C.2. Sejarah Timbulnya Pesantren

Sedikit sekali yang dapat kita ketahui tentang perkembangan pesantren di masa lalu hingga kita bisa menduga-duga tentang ciri-ciri dan pengaruhnya dalam kehidupan keagamaan orang Jawa. Kelompok-kelompok pengajian untuk anak-anak, nampaknya sudah merupakan fenomena yang cukup tua, setua datangnya Islam di Indonesia. Walaupun jumlahnya masih sangat terbatas.²⁶

Secara historis, pesantren telah 'mendokumentasikan' berbagai peristiwa bangsa Indonesia, baik itu sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi, maupun politik bangsa Indonesia. Sejak masa awal penyebaran Islam, pesantren adalah sarana penting bagi kegiatan Islamisasi di Indonesia. Perkembangan dan kemajuan masyarakat Islam nusantara, khususnya Jawa, tidak mungkin terpisahkan dari peranan yang dimainkan pesantren. Berpusat dari pesantren, perpustakaan, roda ekonomi dan kebijakan politik Islam dikendalikan. Di masa

²⁵ Soebardi, *Serat Cabolek; Kuasa, Agama, Pembebasan, Keadilan* (Jakarta, 1976), hal. 42

²⁶ Zamakhsyari Dhofer, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1992), hal. 33-34

walisongo, tidak sedikit wali-wali di Jawa menguasai jaringan perdagangan antar pulau Jawa dengan luar Jawa, seperti Sunan Giri yang memiliki jaringan perdagangan antara Jawa dengan Kalimantan, Maluku, Lombok dan sebagainya. Begitu pula dengan perjalanan politik Islam di Jawa, pesantren memiliki pengaruh yang kuat bagi pembentukan dan pengambilan berbagai kebijaksanaan di keraton-keraton. Misalnya, berdirinya kerajaan Islam Demak, adalah karena dukungan dan kontrol kuat dari para ulama, seperti Sunan Kudus, Kalijaga dan sebagainya. Dari itulah, dapat disimpulkan bahwa dinamika masyarakat Islam di masa awal dapat ditandai dengan adanya hubungan yang sangat kuat antara pesantren, pasar dan keraton.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantren di Indonesia oleh beberapa ahli disebutkan dimulai pada masa-masa permulaan datang dan masuknya Islam ke Indonesia, dimana pondok pesantren yang dianggap paling tua terletak di daerah Aceh. Sedang tinjauan yang lain menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai pendiri pertama pondok pesantren di Indonesia adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Gujarat India.²⁷ Ada juga menyebutkan bahwa yang mendirikan pondok pesantren pertama di Jawa adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, tepatnya di Desa Gapura Gresik.

Tokoh yang dianggap berhasil mendidik ulama dan mengembangkan pondok pesantren adalah Sunan Ampel yang mendirikan pesantren Kembang Kuning Surabaya dan pada waktu pertama kali didirikan hanya memiliki tiga orang santri yaitu Wiryo Suroyo, Abu Huraurah, dan Kyai Bangkuning.

²⁷ Sarijo, *Sejarah Pondok.op.cit.*, hal. 24

Selanjutnya Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta, Surabaya, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel, misinya menyiarkan agama Islam mencapai sukses, dan pesantrennya semakin lama semakin berpengaruh dan menjadi terkenal di seluruh Jawa Timur pada waktu itu.²⁸ Para alumnus pesantren Ampel Denta kemudian mendirikan pesantren-pesantren baru berbagai tempat, seperti di Giri oleh Sunan Giri, Gresik, di Tuban oleh Sunan Bonang, dilamongan oleh Sunan Drajad dan di Demak oleh Raden Patah.²⁹

Diantara santri pesantren Ampel Denta, hanya Raden Patah yang secara khusus berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan pengajaran Islam secara berencana dan teratur, dimana sekitar tahun 1476 M, ia membentuk organisasi pendidikan dakwah Bayangkare Islah (Angkatan Pelopor Perbaikan). Yang merupakan organisasi pendidikan dan pengajaran Islam yang pertama di Indonesia.³⁰

Bukti-bukti sejarah telah menunjukkan bahwa penyebaran dan masa itu berdiri pusat-pusat kekuasaan dan studi Islam, seperti di Aceh, Demak, Giri, Ternate/Tidore dan Gowa Tallo di Makasar. Dari pusat-pusat inilah kemudian Islam tersebar keseluruh pelosok nusantara, melalui pedagang, wali, ulama, mubaligh dan sebagainya, mendirikan pesantren, dayah dan surau. (MUI. 1986:13-14) sejak abad ke 15 M, Islam praktis telah menggantikan dominasi ajaran Hindu, dan sejak abad ke 16 M melalui kerajaan Islam pertama, yaitu Demak, seluruh Jawa telah dapat di Islamkan.³¹

²⁸ Ibid., hal. 25

²⁹ Agus Sunyoto, op.cit., hal. 16

³⁰ Sarijo, *Sejarah Pondok*.op.cit., hal. 27

³¹ Zamakhsyari Dhofer, *Tradisi*.op.cit., hal. 8

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pesantren telah mulai dikenal di bumi nusantara ini dalam periode abad ke 13-17 M, dan di Jawa terjadi dalam abad ke 15-16 M, melalui data sejarah tentang masuknya Islam di Indonesia, yang bersifat global atau makro tersebut sulit menunjuk dengan cepat tahun berapa dan dimana pesantren pertama didirikan. Namun dapat dihitung bahwa sedikitnya pesantren telah ada sejak 300-400 tahun lampau. Dengan usianya yang panjang ini kiranya sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa ia memang telah menjadi milik bangsa dalam bidang pendidikan dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan karenanya cukup pula alasan untuk belajar dari padanya.³²

Dalam masa sekitar abad ke 18-an, Nama pesantren sebagai lembaga pendidikan rakyat terasa sangat berbobot terutama dalam bidang penyiaran agama. Kelahiran pesantren baru selalu diawali dengan cerita “*perang Nilai*” antara pesantren yang akan berdiri dengan masyarakat sekitarnya dan diakhiri dengan kemenangan pihak pesantren, sehingga pesantren dapat diterima untuk hidup di masyarakat dan kemudian menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya dalam bidang kehidupan moral. Bahkan dengan kehadiran pesantren dengan jumlah santri yang sangat banyak dan datang dari berbagai masyarakat lain yang jauh maka terjadi kontak budaya antara berbagai suku dan masyarakat sekitar. Kehidupan ekonomi masyarakat sekitar semakin ramai, banyak pedagang-pedagang kecil lahir, bahkan di beberapa tempat di Jawa Timur lahir pasar santri (di Blok Agung), desa santren (di Jombang) dan sebagainya.³³

³² Mastuhu, *Dinamika*, op.cit., hal. 20

³³ Ibid, hal. 20

Kehadiran pesantren ditengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama, dan social keagamaan pesantren berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat gerakan pengembangan Islam, seperti diakui oleh Soebardi dan Johns, yang dikutip oleh Zamakhsyari Dhofir dalambukunya “Tradisi Pesantren” tersebut:

“Lembaga –lembaga pesantren itulah yang paling menentukan watak keislaman dari kerajaan-kerajaan Islam. Dan memegang peranan paling penting bagi penyebaran Islam sampai ke pelosok-pelosok. Dari lembaga-lembaga pesantren itulah asal usul sejumlah manuskrip tentang pengajaran Islam di Asia Tenggara yang tersedia secara terbatas. Yang dikumpulkan oleh pengembara-pengembara pertama dari perusahaan-perusahaan dagang Belanda dan Inggris sejak akhir abad 16. Untuk betul-betul memahami sejarah Islamisasi diwilayah ini. Kita harus mempelajari lembaga-lembaga pesantren tersebut karena lembaga-lembaga inilah yang menjadi anak panah penyebaran Islam diwilayah ini.”³⁴

Selama zaman colonial, pesantren lepas dari perencanaan pendidikan pemerintah colonial Belanda. Pemerintah belanda berpendapat bahwa system pendidikan Islam sangat jelek, baik ditinjau dari segi tujuan, maupun metode dan bahasa (Bahasa Arab) yang dipergunakan untuk mengajar, sehingga sangat sulit untuk dimasukkan dalam perencanaan pendidikan umum perintah colonial. Tujuan pendidikannya dinilai tidak menyentuh kehidupan duniawi, metode yang dipergunakan tidak jelas kedudukannya, seorang guru: apakah Ia guru atau pemimpin agama, dan dalam hal bahasa yang dipergunakan, tulisan Arab sangat berbeda dengan tulisan Latin sehingga menyulitkan untuk dimasukkan kedalam perencanaan pendidikan mereka. Sebaliknya mereka menerima sekolah Zending untuk memasukan kedalam system pendidikan pemerintah colonial, karena secara filosofis dan teknik dianggap lebih mudah. Yaitu baik tujuan, metode,

³⁴ Zamakhsyari Dhofer, *Tradisi.op.cit.*, hal. 17-18

maupun bahasa yang dipergunakan sesuai dengan nilai kebiasaan pemerintah colonial. Orientasi sekolah umum diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan dalam hidup keduniawian, sedang pesantren mengarahkan orientasinya pada pembinaan moral dalam konteks kehidupan ukhrowi.

Menurut pengamatan penulis, walaupun pesantren pada masa pemerintahan colonial belanda lepas dari perencanaan pendidikan dengan alasan-alasan yang sudah dikemukakan di atas, tetapi pesantren ternyata tetap tegar dan bertahan sampai sekarang, hal ini karena pesantren mempunyai konsep “*Kemandirian*” yang kuat.

Besarnya arti pesantren dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya jawa tidak berlebihan jika pesantren dianggap sebagai bagian historis bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Apalagi, pesantren telah dianggap sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia yang mengakar kuat dari masa pra-Islam, yaitu lembaga pendidikan bentuk asrama agama Budha-Mandala atau *asyrama* yang ditransfer menjadi lembaga pendidikan Islam.³⁵ Karenanya, tidak heran jika system pendidikan pesantren dibanggakan sebagai alternatif yang otentik terhadap system colonial dalam suatu perdebatan yang terjadi disaat pergerakan nasional telah mencapai usia lanjut.³⁶

Ketika Ki Hajar Dewatoro sebagai tokoh pendidikan nasional dan sekaligus sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI yang pertama, berpendapat bahwa pondok pesantren merupakan dasar sumber

³⁵ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1995), hal. 24

³⁶ Abdullah Fajar, *Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Melalui Riset dan Evaluasi* (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 1991), hal. 110

pendidikan nasional, karena sesuai dan selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pemerintah juga mengakui bahwa pesantren dan madrasah merupakan dasar dan sumber pendidikan nasional, oleh karena itu, harus dikembangkan, diberi bimbingan dan bantuan. Wewenang pembinaan dan pengembangan tersebut berada dibawah wewenang Kementerian Agama.

Pada waktu Mr.R. Soewandi menjabat sebagai menteri P dan K dibentuklah panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro. Panitia ini berhasil menetapkan keputusan yang dalam laporan panitia tertanggal 2 juni 1946, dinyatakan bahwa, “Pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu ditingkatkan dan dimodernisasikan serta diberi bantuan biaya dan lain-lain”. Keputusan ini sesuai dengan yang diputuskan oleh BPKNIP pada akhir tahun 1945. (Saleh, 1984:19).

Akan tetapi, seperti dijelaskan oleh Azumardi Azra, para eksponen pesantren cenderung lebih hati-hati dalam menjawab perubahan disekelilingnya. Mereka tidak tergesa-gesa mentransformasikan kelembagaan pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam sepenuhnya, tetapi menerimanya dalam skala yang sangat terbatas; sebatas melakukan penyesuaian yang mereka anggap akan mendukung komunitas pesantren itu sendiri.³⁷

Oleh sebab itulah, mengapa pesantren tetap bertahan sampai sekarang. Derasnya arus modernitas pendidikan Islam tidak dapat melunturkan system kelembagaan pesantren, tidak seperti sistem surau di Sumatra Barat yang tidak mampu bertahan setelah terjadi kontak dengan modernisasi pendidikan Islam.

³⁷ Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana Aktualitas dan Actor Sejarah* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. xvi

Semakin hari jumlah surau semakin berkurang, dan bahkan sekarang ini istilah "surau" banyak diganti dengan istilah "pesantren".

Semenjak pemerintah menitikberatkan pembangunan nasional kepada pembangunan pedesaan, pemerintah merasakan besarnya arti pesantren yang tumbuh di pedesaan. Di tingkat pedesaan yang masyarakatnya sangat religius dan bertani, pesantren merupakan lembaga sosial keagamaan yang sangat efektif bagi masyarakat sekitarnya, sebab pesantren adalah pusat kegiatan spiritual. Sebagai masyarakat pertanian mereka membutuhkan kepemimpinan rohaniyah yang dapat menjaga keharmonisan. Kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti shalat, secara berjamaah dimasjid atau mushallah, kuliah agama berisikan nasehat--nasehat, berpuasa dan shalat teraweh bersama-sama dibulan ramadhan dan lain-lainnya, adalah hal-hal yang mengisi dan memberi makna hidup pada masyarakat desa. Mereka juga membutuhkan pemimpin kepada siapa mereka patuh, meminta nasehat dan meminta keputusan terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal ini, kyai yang memiliki ilmu agama mampu berfungsi sebagai pemimpin agama yang didambakan oleh masyarakat pesantren. Dengan demikian, pesantren mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat sekitarnya.

Jika dikembangkan dan dibina, pesantren bisa dijadikan sebagai pusat perubahan social atau agen perubahan sosial, dalam pembangunan masyarakat desa.³⁸

³⁸ Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 9-10

Sejalan dengan pendapat Dawam Rahardjo, Mukti Ali merasakan perlunya pembaharuan sistem pendidikan dan pengajaran pondok pesantren dalam rangka merealisir tujuan pendidikan nasional.

Perubahan tersebut perlu dilaksanakan, karena pondok pesantren pada umumnya berada diluar Kota atau desa-desa, dan sebagian besar dari pada santri adalah anak-anak petani. Oleh karena itu, pesantren mempunyai kedudukan yang strategis sekali dalam kerangka pembangunan nasional.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan guna mempermudah memahami objek pada penelitian ini, di antaranya adalah:

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (*holistik*). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagaian dari sesuatu keutuhan.³⁹

Dari definisi di atas dapatlah dipahami bahwa *penelitian kualitatif* adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistik*, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan jenis penelitiannya adalah menggunakan studi kasus. Studi kasus atau penelitian kasus adalah penelitian tentang subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.

³⁹ Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal.4.

Subjek penelitian bisa saja individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.⁴⁰ Jadi karena dalam penelitian ini menyangkut tentang Koperasi di PP. An Nur 2 Malang.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sekaligus sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia, yang berbentuk alat-alat bantu dan dokumen-dokumen lainnya dapat pula digunakan, namun fungsinya hanya sebagai instrumen pendukung. Oleh sebab itu kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian ini sebagai tolok ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan atau sumber data disini mutlak diperlukan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian, dalam hal ini penelitian mengambil lokasi di Koperasi PP. An Nur 2 Bululawang Malang. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini adalah

⁴⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 66

karena lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti, dan peneliti juga telah mengenal situasi dan kondisi di lokasi penelitian.

D. Data Penelitian

a. Data yang diperlukan

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh peneliti adalah data yang berkaitan dengan sejarah dan latar belakang PP. An Nur 2 Malang, program kerja Koperasi, struktur organisasi, dan peraturan-peraturan Koperasi Pesantren yang bersangkutan. Data-data di atas peneliti dapatkan dari sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan* selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴¹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini menitik beratkan pada manusia, yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang Koperasi PP. An Nur 2 Malang sebagai tempat penelitian. Adapun sumber data tersebut terdiri dari: *pertama*, sumber data berupa orang (*person*), yaitu Kiyai PP. An Nur 2 Malang dan Ketua Koperasi dan pengurus Koperasi PP. An Nur 2 Malang serta beberapa Santri. *Kedua*, sumber data berupa tempat (*place*) misalnya sarana prasarana Koperasi, aktivitas dan kinerja pengurus dan anggota serta keadaan lokasi penelitian. Dan yang *ketiga*, sumber data berupa simbol (*paper*), yaitu dokumen-

⁴¹ Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hal, 122.

dokumen koperasi seperti program kerja koperasi, jadwal kegiatan belajar mengajar, dan pembagian tugas mengajar guru dan beberapa catatan lainnya.

Adapun sumber data skunder diperoleh dari internet, televisi, makalah-makalah, koran, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

E. Prosedur pengumpulan data

Dalam melancarkan proses penelitian nanti, peneliti akan menggunakan beberapa metode, diantaranya:

a. Interview

Interview adalah sebuah dialog percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara (interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan yang *diwawancarai (interviewee)* yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.⁴²

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴³

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode interview dengan pendekatan yang menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak

⁴² Ibid., hal.135

⁴³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.70.

perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Petunjuk itu mendasarkan diri atas anggapan bahwa ada jawaban yang secara umum akan sama diberikan oleh para responden, tetapi yang jelas tidak ada perangkat pertanyaan baku yang disiapkan terlebih dahulu. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara sebenarnya.⁴⁴

Metode ini penulis gunakan untuk mencari informasi tentang gambaran singkat sejarah berdirinya PP. An Nur 2 Malang dan Koperasi Pesantren, serta faktor pendukung dan penghambat kinerja Koperasi di PP. An Nur 2 Malang

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematika fenomena yang ada.⁴⁵ Observasi yaitu cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.⁴⁶

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi agar dapat melihat secara langsung kondisi Koperasi PP. An Nur 2 Malang. Yaitu keadaan atau suasana koperasi pesantren, barang-barang yang tersedia untuk kebutuhan Santri, dan keadaan sarana dan prasarana Koperasi di PP. An Nur 2 Malang

⁴⁴ Lex J. Moleong, op.cit., hal. 136

⁴⁵ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hal. 69.

⁴⁶ Anwar Sanusi, *metodologi penelitian Praktis; Untuk ilmu Sosial dan Ekonomi*, (Malang: Buntara Media, 2003), hal. 97-98.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴⁷ Menurut Irawan studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.⁴⁸

Metode dokumen digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan program kerja Koperasi Pesantren, struktur organisasi Koperasi Pesantren, keadaan dan jumlah pengurus serta anggota.

F. Analisis data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁹

Di pihak lain, analisis data kualitatif, prosesnya berjalan sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.

⁴⁷ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003), hal. 181.

⁴⁸ Sukandarrumidi, *op.cit.*, hal. 100.

⁴⁹ Lex J. Moleong, *op.cit.*, hal. 248.

- c. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.⁵⁰

Adapun teknis analisis data yang peneliti gunakan adalah teknis analisis data diskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada di lapangan yaitu hasil penelitian dengan dipilah-pilah secara sistematis menurut kategorinya dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh semua orang.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah dialami oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik, antara lain:

- a. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik Trianggulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.⁵¹

Dalam hal ini peneliti membandingkan pendapat informan yang satu dengan yang lainnya agar keabsahan data tersebut benar-benar terjamin.

⁵⁰ Ibid..

⁵¹ Ibid, hal. 330.

b. Kecukupan Referensial

Konsep kecukupan referensial ini mula-mula diusulkan oleh Eisner sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi.⁵²

Dalam hal ini peneliti menggunakan tape-recorder sebagai alat perekam yang dapat dimanfaatkan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan kritik yang telah terkumpul. Jadi, bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu-waktu diadakan analisis data.

⁵² Lex J. Moleong, *op.cit.*, hal. 181

BAB IV

DATA PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Nama : Pondok Pesantren AN-NUR II Al-Murtadlo
Pendiri : Almagfurlah KH.Anwar Noor
Pengasuh : KHM Badruddin Anwar
Tahun : 1979
Alamat : Jl.Raya Bululawang Malang Jatim
Telpon : (0341) 833598 - 833235 – 833463
Facsimile : (0341) 832160
Website : <http://annur2.cjb.net>

1. Sejarah Pondok Pesantren An-nur II Al-Murtadlo

Pondok Pesantren An-nur II Al-Murtadlo Bululawang Kabupaten Malang di dirikan pada tanggal 26 Agustus 1979 oleh Kyai Haji Moh. Badruddin Anwar (putra pertama KH.Anwar Nur) yang bertepatan malam menjelang hari raya idul fitri, yang pada awal berdirinya Pondok Pesantren ini hanya berupa rumah dari bambu (gedek; jawa) ukuran 4 X 6 meter sebagai tempat tinggal santri bersama kyai pengasuh (K.H.Moh. Badruddin Anwar).

Keberadatan pondok pesantren pada awal berdirinya berada di tanah hutan dengan jumlah rumah penduduk yang relatif sedikit dan jaraknya saling berjauhan. Pada malam hari gelap gulita dan sepi, sehingga Pondok Pesantren ini kurang di kenal masyarakat, sehingga kurang diminati masyarakat luas untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

Keadaan dan suasana Pondok Pesantren seperti digambarkan di atas, ternyata tidaklah mengurangi ide, tekad dan semangat K.H. Moh. Badruddin untuk mengenalkan Pondok Pesantren yang baru berdiri dan dipimpinnya itu kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan ditunjang dengan kegiatan K.H. Moh. Anwar Nur semasa hidupnya. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan bermain layang-layang dalam bentuk pertandingan yang dilaksanakan di seputar lokasi Pondok Pesantren.

Beberapa hari setelah pertandingan layang-layang selesai, mulailah berdatangan tamu dan orang tua yang menginginkan anaknya menjadi santri di Pondok Pesantren An-nur II Al-murtadlo Bululawang. Semula santri yang ikut mengaji dan tinggal bersama K.H. Moh. Badruddin berjumlah 4 orang menjadi 26 orang dan terus bertambah dengan bergulirnya tahun demi tahun. Demikian pula dengan jumlah bangunannya yang semakin bertambah.

Adapun nama Pondok Pesantren ini awalnya adalah bernama "An-nur Al-murtadlo" Bululawang yang kemudian berubah menjadi "An-nur II Al-murtadlo". Perubahan ini terjadi pada tahun 1984, ketika kyai A. Qusyairi Anwar (adik kandung dari K.H. Moh. Badruddin Anwar atau putra kedua dari kyai sepuh) direstui kyai sepuh untuk mendirikan Pondok Pesantren khusus Pondok Pesantren putri di sebelah timur Pondok Pesantren An-nur. Oleh karena itu, ketiga Pondok Pesantren yang ada berubah nama dengan mencantumkan urutan berdirinya dengan alasan untuk memudahkan dalam mengetahui keberadaan masing-masing Pondok Pesantren tersebut.

Pondok Pesantren An-nur yang didirikan pertama, diasuh oleh K.H. Moh. Anwar Nur yang dinamakan "Pondok Pesantren An-nur I", Pondok Pesantren yang diasuh K.H. Moh. Badruddin Anwar dinamakan "Pondok Pesantren An-nur II", dan Pondok Pesantren putri yang di asuh oleh K.H.A.Qusyairi Anwar dinamakan "Pondok Pesantren An-nur III". Agar tidak menghilangkan eksistensi sejarah awal berdirinya Pondok Pesantren An-nur II tidak menghapus nama "Al-murtadlo" di belakang nama pesantrennya, karena itu sampai sekarang pesantren ini tetap memakai nama "Al-murtadlo" di belakang nama lembaga pendidikannya. Meskipun Pondok Pesantren An-nur II "Al-murtadlo" Ini berlokasi di desa Krebet Senggrong, tetapi oleh masyarakat lebih dikenal dengan "Pondok Pesantren An-nur II Bululawang".

2. Tujuan Umum

- 1) Meningkatkan dan membantu Pondok Pesantren dalam rangka membina dan memotivasi Pondok Pesantren seluruh Indonesia sehingga mampu mencetak manusia muslim selaku kader-kader penyuluh pembangunan yang bertaqwa, cakap, berbudi luhur, dan menjaga keluarga, serta keselamatan bangsa.
- 2) Meningkatkan Pondok Pesantren dalam mata rantai sistem pendidikan nasional baik pendidikan formal maupun non formal dalam rangka membangun manusia seutuhnya dan perencanaan tenaga kerja yang menghasilkan anggota masyarakat yang memiliki kecakapan sebagai tenaga pembangunan.
- 3) Membina warga negara agar berkepribadian Muslim sesuai dengan ajaran

Islam dan menanamkannya pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.

3. Tujuan Khusus

- a) Mendidik santri / anggota masyarakat menjadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, ketrampilan, sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- b) Mendidik santri / anggota masyarakat sebagai kader kader ulama dan muballigh, yang berjiwa ikhlas, tabah, teguh, dan berwiraswasta dalam mengamalkan ajaran islam secara utuh dan dinamis.
- c) Mendidik santri / anggota masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia – manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
- d) Mendidik santri / anggota masyarakat menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan khususnya pembangunan spiritual.
- e) Mendidik santri / anggota masyarakat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam rangka usaha pembangunan.⁵³

B. Peranan Koperasi Santri dalam Rangka Membangun dan Mengembangkan Pondok Pesantren An Nuur II

⁵³ <http://annur2.cjb.net>

Berdasarkan Akta Pendirian Koperasi yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil, nama Koperasi Pondok Pesantren An Nuur II ini adalah Koperasi Pondok Pesantren “An Nuur II Al-Murtadho” Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Koperasi ini beralamatkan di Jl. Raya Bululawang, Kecamatan Bululawang.

Adapun kepengurusan koperasi pondok pesantren “An Nuur II Al-Murtadho” adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Drs.H. Khairuddin, Ak, Msi	Ketua
Fathul Bari S.Ag. M.Ag	Sekretaris
Syamsul Arifin	Bendahara

Adapun susunan Pengawas Kopontren An Nuur II Bululawang adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Mahsusoh	Ketua
Taufiqurrahman	Anggota
Zainuddin	Anggota

Pada dasarnya, pesantren yang mendirikan koperasi bukanlah hal yang baru. Pesantren-pesantren pra kemerdekaan juga telah melakukannya dan terbukti dapat meningkatkan wawasan alumnninya akan pentingnya jiwa kepengusahaan yang baik. Baik itu untuk dirinya sendiri maupun sebagai bagian dari dakwah *bil hal*.

Hal tersebut di atas dikarenakan Pesantren juga dapat berfungsi dan memiliki potensi sebagai inkubator bisnis dengan mengandalkan pengalaman pesantren yang dapat ditularkan kepada masyarakat khususnya mereka yang berhubungan langsung dengan pesantren seperti masyarakat sekitar, masyarakat pengguna jasa pesantren maupun jaringan pesantren itu sendiri.

Demikian juga halnya yang terdapat di Pondok Pesantren An Nuur II Bululawang Malang. Pengelola pesantren telah berinisiatif untuk membentuk Koperasi sebagai salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan santri pembangunan dan pengembangan pesantren.

Di pesantren An Nuur II, terdapat dua (2) jenis Koperasi. Yaitu koperasi yang dikelola oleh Pengasuh Pondok Pesantren (Kyai) dan Koperasi Pondok (Kopontren) Pesantren yang dikelola secara professional. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh H. Khairuddin selaku ketua Kopontren,

“Di sini (An Nuur II), terdapat dua bentuk koperasi. Yang pertama adalah koperasi yang dibuat dan dikelola oleh Pengasuh pondok dan yang kedua adalah Koperasi Pondok Pesantren.”⁵⁴

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua Kopontren di atas, maka pada prinsipnya terdapat dua koperasi yang dikelola oleh pondok pesantren An Nuur II. Namun demikian, kedua koperasi tersebut dikelola dan dipimpin oleh dua sistem dan organ yang berbeda.

“Koperasi yang terdapat di “dalam” pesantren di kelola oleh Kyai dengan menggunakan sistem yang secara definitif atau teoritik belum dapat disebut koperasi, tetapi dinamakan koperasi. Adapun koperasi yang ada di “luar”, dikelola secara professional dengan menggunakan kaidah-kaidah koperasi yang sebenarnya.”⁵⁵

⁵⁴ Wawancara, H. Khairuddin (Malang, 16 Januari 2008)

⁵⁵ Wawancara, H. Khairuddin (Malang, 16 Januari 2008)

Menarik untuk diketahui adalah, definisi dari kedua jenis koperasi yang dikelola dan dikembangkan oleh pesantren An Nuur II tersebut. Menurut H. Khairuddin,

“koperasi “dalam” pada dasarnya tidak memenuhi keidah-kaidah Koperasi pada umumnya, seperti tidak memiliki AD/ART yang jelas, tidak ada perekrutan anggota, tidak memiliki rapat-rapat yang dikenal di dalam koperasi, tidak ada pembagian SHU dan lain sebagainya. Namun pesantren tetap menamakan badan usaha tersebut dengan koperasi. Berbeda dengan Koperasi di “luar”. Koperasi ini memiliki visi dan misi yang jelas, anggotanya juga jelas, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang jelas, ada rapat tahunan anggota ada pembagian SHU dan yang paling penting telah terdaftar dan mendapatkan akta Notaris”⁵⁶

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa secara de facto terdapat dua jenis koperasi yang dikelola oleh pesantren An Nuur II. namun secara de jure, hanya terdapat satu koperasi yang didirikan berdasarkan kaidah-kaidah Koperasi dan dikelola secara profesional.

Adapun bentuk usaha yang dikembangkan oleh kedua koperasi tersebut tentunya juga sangat berbeda. Koperasi “dalam” hanya menyiapkan kebutuhan santri sehari-hari. Menurut Ahmad seorang timer koperasi “dalam”,

“di sini hanya menyiapkan kebutuhan santri mas, seperti perlengkapan mandi, kitab-kitab, sajadah dan perlengkapan belajar yang lainnya”⁵⁷

Berdasarkan apa yang di sampaikan oleh Ahmad tersebut, maka tentunya Kopontren yang dikelola oleh pesantren secara profesional melakukan usaha yang lebih besar dan luas dari hanya sekedar yang dilakukan oleh koperasi “dalam”.

Menurut H. Khairuddin,

“koperasi yang saya kelola telah berkembang cukup pesat dan melingkupi

⁵⁶ Wawancara, H. Khairuddin (Malang, 16 Januari 2008)

⁵⁷ Wawancara, Ahmad (Malang, 18 Januari 2008)

usaha dan bisnis yang cukup besar, hal ini terlihat dari bidang usahanya. Saat ini, kopontren mengelalola bidang niaga yang terdiri dari Swalayan (Waserda) dan bengkel olie. Kemudian bidang jasa, ada Unit Tebu Rakyat (TR) dan Unit Simpan Pinjam”⁵⁸

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, bahwa koperasi yang dikelola oleh pengasuh pesantren sangat sederhana. Bidang usahanya juga hanya terdiri dari bidang niaga saja yaitu menjual keperluan sehari-hari para santri. Sementara usaha niaga yang dikembangkan oleh Kopontren, tidak hanya mencakup kebutuhan santri, melainkan juga mencakup kebutuhan masyarakat sekitar pesantren dan masyarakat pada umumnya.

Melihat beberapa bidang usaha yang dijalankan oleh kopontren, tentunya memiliki andil yang cukup besar terhadap pembangunan dan pengembangan pondok Pesantren An Nuur II. H. Khairuddin menjelaskan,

“10 % dari keuntungan bidang usaha yang dikelola oleh Kopontren dialokasikan kepada pondok pesantren yang di dalam AD/ART kopontren dimasukkan ke dalam dana pendidikan dan dana sosial.”⁵⁹

Apa yang disampaikan oleh ketua Kopontren tersebut di atas, sesuai dengan apa yang terdapat di dalam AD/ART kopontren. Di dalam AD/ART Kopontren bab XV pasal (2) disebutkan,

Pasal (2), sisa hasil Usaha KOPERASI ditetapkan sebagai berikut:

- a. 25 % untuk dana cadangan;
- b. 25 % untuk Anggota sebanding dengan transaksi uasaha
- c. 25 % untuk anggota sebanding dengan Simpanannya;
- d. 10 % untuk Pengurus;
- e. 5 % untuk dana Kesejahteraan Karyawan;
- f. 5 % untuk Dana Pendidikan;
- g. 5 % untuk dana Sosial.⁶⁰

⁵⁸ Wawancara, H. Khairuddin (Malang, 16 Januari 2008)

⁵⁹ Wawancara, H. Khairuddin (Malang, 16 Januari 2008)

⁶⁰ Departemen Koperasi dan Pemniaan Pengusaha Kecil, Akta Pendirian Koperasi. Hal. 24-25

Dengan demikian, 10 % dari Sisa Hasil Usaha Kopontren dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan pondok pesantren An Nuur II “Al Murtadho” Bululawang Malang. Adapun keuntungan koperasi “dalam” yang dikelola oleh pengurus pesantren, meskipun tanpa anggaran yang jelas, juga digunakan dan dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan pesantren An Nuur II. H. Khairuddin menjelaskan,

“ada beberapa bangunan bagus dan cukup megah yang dibangun oleh pondok, juga sebagian dananya bersumber dari hasil keuntungan yang diperoleh dari koperasi yang dikelola di dalam tadi. Karena saya yakin, bahwa komitmen Kiyai di dalam membangun dan mengembangkan pesantren An Nuur II ini cukup komit”⁶¹

Demikianlah paparan data yang peneliti peroleh dari lokasi penelitian yaitu di Koperasi Pondok Pesantren An Nuur II “Al- Murtadho” Bululawang Malang.

⁶¹ Wawancara, H. Khairuddin (Malang, 16 Januari 2008)

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

A. Koperasi Santri Dan Pengembangan Pondok Pesantren An Nuur Ii Bululawang

Peran pesantren dalam pengembangan dan pendayagunaan potensi masyarakat sudah tidak diragukan lagi. Pendayagunaan potensi ekonomi disamping potensi-potensi lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam misi dakwah memodernkan ummat agar mereka selalu berpegang teguh kepada Iman, Islam dan Ihsan.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat oleh pesantren adalah dengan pembentukan koperasi. Apalagi saat ini upaya pemerintah dalam memudahkan kegiatan rakyat dalam pembiayaan usaha telah mengarah kepada kerjasama dengan ormas-ormas seperti NU dan Muhammadiyah.

Fungsi koperasi yang dibentuk oleh pesantren, sebagaimana juga yang terdapat di An Nuur II adalah untuk menstimulasi potensi ekonomi pesantren yang berkemungkinan dapat membantu masyarakat dan ummat. Fungsi lain adalah sebagai salah satu alternatif pembiayaan biaya operasional pesantren dari bagi hasil yang didapat dari usaha-usaha yang dilakukan koperasi seperti katering, pemondokan, media komunitas, usaha sembako, minimarket dan lain sebagainya.

Selain fungsi di atas, koperasi pesantren juga dapat menjadi sebagai sarana simpan pinjam yang dapat menjamin kelangsungan santri dan masyarakat sekitar, baik untuk modal usaha maupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbedaan utama koperasi pesantren dengan bentuk-bentuk koperasi lain adalah keanggotaan koperasi pesantren biasanya berkembang secara kuantitas. Keanggotaan koperasi pesantren dapat dikembangkan secara horizontal ke masyarakat sekitar pesantren, masyarakat umum dan lain sebagainya tanpa batas.

Sedangkan koperasi-koperasi lainnya itu biasanya berkembang secara kualitatif. Keanggotannya sangat terbatas dan stagnan itu-itu saja. Namun secara kualitas dapat ditingkatkan menjadi koperasi yang efisien, efektif dan fungsional dengan daya guna yang terjamin.

Hal ini terlihat di Kopontren An Nuur II Bululawang. Berdasarkan keanggotaannya, Kopontren yang terdapat di An Nuur II dapat disebut sebagai koperasi alumni. Karena koperasi ini dibentuk oleh dan beranggotakan sebagian besar dari para alumni pondok pesantren An Nuur II. Koperasi Alumni biasanya didirikan oleh para alumni sebuah lembaga pendidikan atau pesantren dengan tujuan mendayagunakan potensi alumni. Selain berfungsi sebagai media atau forum masa transisi santri dari dunia pendidikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat baru yang digelutinya. Koperasi alumni juga dapat menjadi tempat sharing potensi bisnis, bidang usaha dan dunia pekerjaan dalam masyarakat.

Hingga saat ini Koperasi Pondok Pesantren yang berada di Pondok Pesantren An Nuur II Al-Murtadho Bululawang adalah koperasi yang cukup

eksis, baik di dalam mengkomodir keperluan dan kebutuhan anggotanya, juga di dalam memberikan manfaat untuk pengembangan pondok pesantren.

Mengoperasikan ponpes sebesar An Nuur II tersebut, tentunya membutuhkan dana yang besar. Namun pihak Pesantren memiliki langkah alternatif untuk tetap mempertahankan keberadaan pondok pesantren tersebut. Sumbangsih Kopontren dirasakan sangat membantu di dalam membangun dan mengembangkan pesantren. 10 % dari sisa hasil usaha yang didiberikan oleh kopontren bukanlah jumlah yang kecil dalam rangka menambah dana operasional pondok pesantren.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Pondok pesantren an Nuur II memiliki dua jenis koperasi, yaitu koperasi yang dikemabangkan secara pribadi oleh pengurus Pondok (Kyai) yang hanya menggeluti bidang niaga saja. Koperasi ini hanya berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan santri sehari-hari. Seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan santri. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, koperasi menyiapkan beberapa daftar kitab dan referensi lain yang dibutuhkan oleh santri dalam rangka proses pembelajaran di Pondok pesantren An Nuur.

Sebagaimana yang dikatakan oleh H. Khairuddin, bahwa secara konseptual atau teori, koperasi ini pada dasarnya tidak dapat disebut dengan koperasi, karena beberapa konsep dasar koperasi tidak diterapkan oleh koperasi ini. Sebagaimana yang secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah perusahaan yang

dikelola secara demokratis. Atau berdasarkan mekanisme pendirian sebuah koperasi misalnya.

Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa ada beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh sebuah koperasi. *Pertama*, pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 anggota. *Kedua*, Para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota, untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi (ketua, sekretaris, dan bendahara). Setelah itu, koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan rumah tangga koperasi itu. Lalu meminta perizinan dari negara. Barulah bisa menjalankan koperasi dengan baik dan benar. Beberapa langkah tersebut tidak dijalankan oleh koperasi yang dijalankan oleh Kiyai ini.

Secara sederhana, koperasi ini kemudian dikenal dengan koperasi "dalam". Meskipun secara konseptual koperasi ini tidak layak dinamakan dengan koperasi, namun sumbangsih terhadap pembangunan dan pengembangan pondok pesantren An Nuur II cukup signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan ketua Kopontren, sebagian dari dana operasional dan pembangunan pondok, juga berasal dari hasil keuntungan koperasi tersebut.

Adapun koperasi yang dikelola dan didirikan secara profesional oleh elemen Pondok Pesantren An Nuur II dikenal dengan nama Kopontren An Nuur II "Al Murtadho". Koperasi ini secara sederhana disebut dengan koperasi "luar". Hal ini dikarenakan oleh letaknya di luar kompleks Pondok dan dibangun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan santri yang termasuk "orang dalam" Pesantren.

Dari hasil SHU Kopontren, An Nuur dapat terus membangun dan mengembangkan pondoknya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Pengembangan pesantren secara kuantitas, terlihat dari pembangunan fisik yang dari tahun ke tahun terus memperlihatkan peningkatan. Beberapa bangunan baru terus dibangun dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana santri yang terus bertambah. Adapun secara kualitas, An Nuur terus mengembangkan pengaruh dan *responsibility*-nya untuk tetap peduli dengan keadaan masyarakat sekitar. Ponpes memang tak bisa cuci tangan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Hal ini ditunjukkan dengan pengadaan bidang usaha Kopontren di bidang jasa yang berupa Unit Simpan Pinjam dan Tebu Rakyat.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat di Ad/ART, 5 % SHU diperuntukkan Dana Pendidikan; serta 5 % lagi untuk dana Sosial. Namun oleh pengurus dan berdasarkan rapat anggota, kedua anggaran tersebut dialokasikan untuk Pengembangan Pondok pesantren. Artinya, pesantren mendapat 10 % dari SHU Kopontren.

Di dalam Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2007 Rapat Anggota Tahunan Kopontren "An Nuur II" bahwa pada tahun 2006 pendapatan kopontren dari berbagai unit usahanya berjumlah Rp.152,407.939., dikurangi biaya operasional sebesar Rp. 120,041.989., maka Sisa Hasil Usahanya sebesar Rp. 32.365,950. Artinya, sekitar Rp 3.300.000 yang merupakan 10 % dari SHU tersebut dialokasikan ke pondok pesantren.

Sementara di tahun 2007, pendapatan kopontren dari berbagai unit usahanya mengalami peningkatan, yaitu berjumlah Rp.196, 120,121. Kemudian

dikurangi biaya operasional sebesar Rp.160,460,650. Maka Sisa Hasil Usahanya sebesar Rp.35,659,471. Artinya, sekitar Rp.3.600.00., yang merupakan 10 % dari SHU tersebut dialokasikan ke pondok pesantren.

Berdasarkan paparan di atas, dalam dua tahun terakhir pondok pesantren An Nur II melalui Kopontrennya telah mendapat tambahan dana operasional sebesar Rp. 6.900.000 Dengan adanya tambahan dana yang berasal dari SHU Kopontren “An Nur II” tersebut, pesantren An Nur II dapat menambah dana untuk pembangunan dan pengembangan baik di bidang sarana maupun dan prasarana pesantren.

Dengan demikian, eksistensi Koperasi Pondok Pesantren yang terdapat di Pondok Pesantren “An Nur II Al-Murtadho” Bululawang, benar-benar dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan pengembangan pondok pesantren. Selain dari itu, keberadaan kopontren, baik koperasi “dalam” maupun koperasi “luar” telah mampu mengcover semua kebutuhan santri dan masyarakat sekitar pesantren.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan:

- a. Koperasi Pondok Pesantren memiliki peran yang signifikan di dalam pembangunan dan pengembangan Pondok Pesantren. Hal ini terlihat di Pondok Pesantren An Nurr II Bululawang. Dari hasil Sisa Hasil Usaha Koperasi Pondok Pesantren “An Nurr II Al-Murtadho”, Pesantren An Nurr II terus melakukan pembangunan dan pengembangan pondok, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Pengembangan pesantren secara kuantitatis, terlihat dari pembangunan fisik yang dari tahun ke tahun terus memperlihatkan peningkatan dan pemenuhan kebutuhan santri yang tinggal di dalam atau di sekitar pesantren. Adapun secara kualitas, An Nurr terus mengembangkan pengaruh dan *responsibility*nya untuk tetap peduli dengan keadaan masyarakat sekitar. Hal ini ditunjukkan dengan pengadaan bidang usaha Kopontren di bidang jasa yang berupa Unit Simpan Pinjam dan Tebu Rakyat. Keberadaan Koperasi di pondok pesantren An Nurr II tetap

dipertahankan keberadaannya. Hal ini dilakukan mengingat sumbangsih Kopontren yang cukup signifikan didalam pembangunan dan pengembangan Pondok Pesantren baik secara kuantitas maupun kualitas.

- b. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat di Ad/ART, 5 % SHU diperuntukkan Dana Pendidikan; serta 5 % lagi untuk dana Sosial. Namun oleh pengurus dan berdasarkan rapat anggota, kedua anggaran tersebut dialokasikan untuk Pengembangan Pondok pesantren. Artinya, pesantren mendapat 10 % dari SHU Kopontrendi tahun 2007, pendapatan kopontren dari berbagai unit usahanya mengalami peningkatan, yaitu berjumlah Rp.196, 120,121. Kemudian dikurangi biaya operasional sebesar Rp.160,460,650. Maka Sisa Hasil Usahanya sebesar Rp.35,659,471. Artinya, sekitar Rp.3.600.00., yang merupakan 10 % dari SHU tersebut dialokasikan ke pondok pesantren dalam dua tahun terakhir pondok pesantren An Nur II melalui Kopontrennya telah mendapat tambahan dana operasional sebesar Rp. 6.900.000 Dengan adanya tambahan dana yang berasal dari SHU Kopontren “An Nuur II” tersebut, pesantren An Nuur II dapat menambah dana untuk pembangunan dan pengembangan baik di bidang sarana maupun dan prasarana pesantren. Dengan demikian, eksistensi Koperasi Pondok Pesantren yang terdapat di Pondok Pesantren “An Nuur II Al-Murtadho” Bululawang, benar-benar dapat memberikan dampak

positif terhadap pembangunan dan pengembangan pondok pesantren. Selain dari itu, keberadaan kopontren, baik koperasi “dalam” maupun koperasi “luar” telah mampu mengcover semua kebutuhan santri dan masyarakat sekitar pesantren.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka peneliti menyarankan:

- a. Keberadaan Koperasi di pondok pesantren An Nuur II tetap dipertahankan keberadaannya. Hal ini dilakukan mengingat sumbangsih Kopontren yang cukup signifikan didalam pembangunan dan pengembangan Pondok Pesantren baik secara kuantitas maupun kualitas.
- b. Pengembangan Kopontren harus terus dilakukan. Masih banyak unit usaha yang dapat dikembangkan, hal ini dilakukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan anggota dan masyarakat yang kian hari kian kompleks. Dengan demikian, dibutuhkan respons Kopontren dalam rangka mengakomodir keperluan dan kebutuhan tersebut.
- c. Pengurus dan anggota Kopontren harus tetap meningkatkan performanya, dengan demikian Sisa Hasil Usahanya dapat terus ditingkatkan. Secara eksternal
- d. Bagi pondok pesantren yang belum memiliki koperasi, hendaknya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh ponpes An Nuur II, hal ini dilakukan mengingat bahwa kewajiban sosial ponpes tidak

hanya amar makruf nahi munkar bil lisan saja. Melainkan juga ikut terlibat secara aktif di dalam memenuhi kebutuhan ekonomis ummat.



DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Abdullah. 1991. *Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Melalui Riset dan Evaluasi* Yogyakarta: PT.Tiara Wacana.
- Sunyoto, 1990. Agus. *Sunan Ampel*. Surabaya.
- Hanel, Alfred. 2005. *Organisasi Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sanusi, Anwar. 2003. *Metodologi penelitian Praktis; Untuk ilmu Sosial dan Ekonomi*, Malang: Buntara Media.
- Sitio, Arifin. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga
- Azra, Azyumardi, 2002. *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana Aktualitas dan Actor Sejarah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Narbuk, Cholid dan Abu Achmadi. 2002. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Geertz, Clifford. 1989. *Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Raharjo, Dawam. 1995. *Pesantren dan Pembangunan* Jakarta: LP3ES.
- Depdikbud, 1980. *Kamus Besar Bahasa Indionesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suharto, Edi. 2003. *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Mizan.
- Hendar, 2005. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: LP Fakultas Ekonomi UI.
- <http://annur2.cjb.net>
- [http: Dinas Koperasi & Pengusaha Kecil Menengah](http://Dinas Koperasi & Pengusaha Kecil Menengah)
- Moleong, Lex J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Margono, 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Van Bruinessen, Martin. 1995. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Mastuhu, 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.

- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mubyarto, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta, BPFE.
- Madjid, Nur Kholis. 1985. *Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Baswir, Revrison. 2000. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- , 2000. *Pembangunan tanpa Pemerasan; Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: ELSAM.
- Saridjo Marwan, Abd. Rahman Saleh dan Musthafa Syarif, 1979. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- Soebardi, 1976. *Serat Cabolek; Kuasa, Agama, Pembebebasan, Keadilan*. Jakarta.
- Arif, Sritua. 2002. *Ekonomi Kerakyatan Indonesia: Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sudarsono dan Edilius, 2005. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sukandarrumidi, 2004. *Metode Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- T.H. Gibb, 1932. *Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta.
- Dhofer, Zamakhsyari. 1992. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP